

**RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 149K/PID.SUS/2013 TENTANG PENYALAH GUNA
NARKOTIKA**

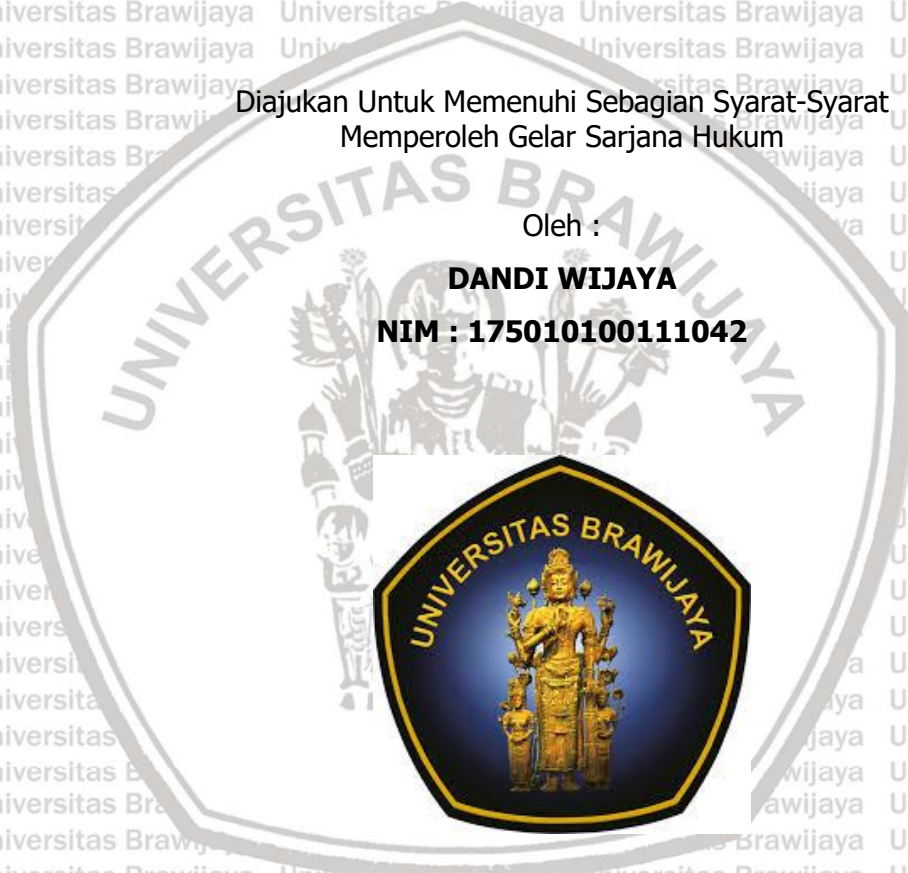
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DANDI WIJAYA

NIM : 175010100111042



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

NOMOR 149K/PID.SUS/2013 TENTANG PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Identitas Penulis :

a. Nama : Dandi Wijaya

b. NIM : 175010100111042

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian :

Disetujui pada tanggal : 12 Juli 2021

Pembimbing Utama



Dr. Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 196406201989031002

Pembimbing Pendamping



Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.
NIP. 198408162015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP 196705031991032002

HALAMAN PENGESAHAN

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
149K/PID.SUS/2013 TENTANG PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh:

DANDI WIJAYA

NIM. 175010100111042

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 7 Juli 2020 dan
disahkan pada tanggal: 12 Juli 2021

Pembimbing Utama



Dr. Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 196406201989031002

Pembimbing Pendamping



Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.
NIP. 198408162015042002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP 196705031991032002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Ibu Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. yang selalu memberikan bantuan, bimbingan dan nasehat yang tiada henti bagi penulis
7. Ibu Tinah dan Bapak Suwito(alm) selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan biaya, doa, dan dukungan tiada henti kepada penulis sehingga dapat membentuk kepribadian penulis.
8. Heri Setiawan, S.H., M.Kn. , Dheni Winanto, S.H., Debby Sulistyaningrum, S.P , Dika April Yani , Eiffelin Putra Setiawan, dan Abdullah Pandhu, dan Devi Nurmalasari yang selalu memberikan nasehat dukungan dan semangat bagi penulis.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 8 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	vi

BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN

A. Latar Belakang	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Narkotika.....	19
1. Pengertian Narkotika	19
2. Jenis-jenis Narkotika	21
B. Kajian Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	26
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	26
2. Faktor – faktor Penyalahgunaan Narkotika	27
3. Tindak Pidana Narkotika	28
4. Jenis-jenis tindak Pidana Narkotika.....	29
C. Kajian Umum Tentang Putusan Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan	31
2. Jenis Putusan Hakim	36
3. Asas-asas dalam Putusan Hakim.....	40
4. Fungsi Putusan Hakim	42
D. Kajian Umum Tentang Ratio Decidendi Hakim.....	44
1. Pengertian Ratio Decidendi	44
2. Syarat Ratio Decidendi Hakim	45
3. Tujuan Ratio Decidendi Hakim	45

4. Hubungan Ratio Decidendi Dengan Putusan Hakim	46
5. Hubungan Ratio Decidendi Dengan Metode Penafsiran Hukum.....	47

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 149K/PID.SUS/2013	49
--	----

1. Kronologi.....	54
-------------------	----

2. Putusan di Tingkat Pengadilan Negeri dan Putusan di Tingkat	
--	--

Pengadilan Tinggi dan Putusan Tingkat Kasasi.....	56
---	----

a. Putusan di Tingkat Pengadilan Negeri	56
---	----

b. Putusan di Tingkat Pengadilan Tinggi	60
---	----

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013	60
---	----

3. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Agung dalam memutus pemidanaan pada putusan nomor Putusan Nomor 149K/Pid.Sus/2013.....	63
---	----

a. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi	63
--	----

b. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Nomor 149K/Pid.Sus/2013... ..	64
---	----

1) <i>Ratio Decidendi</i> Hakim pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	65
---	----

2) <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013	73
---	----

B. IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA ATAS PUTUSAN MA NO. 149K/PID.SUS/2013.....

1. Implikasi Yuridis Secara Umum	89
--	----

a. Batalnya Putusan Peradilan Dibawahnya	89
--	----

b. Putusan Mempunyai Kekuatan Eksekutorial.....	90
---	----

c. Putusan Menjadi Yurisprudensi.....	91
---------------------------------------	----

2. Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 Terhadap Penyalah Guna Narkotika	92
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
---------------------	-----

B. Saran	103
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Dandi Wijaya, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2021, Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 Tentang Penyalah Guna Narkotika, Dr. Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.H., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

Pada skripsi ini Penulis mengangkat permasalahan yang dilatar belakangi dengan adanya dua pasal yang dinilai multitafsir dan memiliki ketidakjelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pada pasal 112 tersebut tidak membedakan antara penyalah guna narkotika yang digunakan untuk diri sendiri dengan penyalah guna narkotika yang dalam hal ini memenuhi unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan' untuk orang lain. Sehingga cakupan dalam pasal 112 dapat dikatakan lebih luas dibandingkan dengan makna penyalahguna dalam pasal 127. Penulis dalam hal ini mengangkat kasus atas nama terdakwa Julie Munthe untuk dijadikan objek penelitian yang perlu ditulis dan diteliti dikarenakan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat hakim yang mengajukan *Dissenting opinion (DO)*. Dan hal tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus kasus terkait penyalahgunaan Narkotika dengan beberapa prespektif.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Ratio Decidendi hakim dalam memutus pembedaan terhadap penyalahguna narkotika pada putusan no.149K/Pid.Sus/2013? (2) Bagaimana implikasi yuridis terhadap penyalah guna narkotika atas putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013?

Kemudian penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan metode deduksi dan penafsiran.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada Bahwa Ratio Decidendi hakim dalam memutus pembedaan terhadap penyalah guna narkotika pada putusan Mahkamah Agung no.149K/Pid.Sus/2013 adalah hakim lebih melihat bagaimana rumusan perbuatan dalam Pasal 112 Undang-undang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan ditemukannya adanya alat bukti Narkotika yang memenuhi rumusan Pasal bahwa Pelaku telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I. Dan Hakim menganggap bahwa Pelaku Tidak sebagai penyalahguna Narkotika berdasarkan keterangan dimana pada saat penggeledahan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika. Selanjutnya *dissenting opinion* (berbeda pendapat) dalam putusan Mahkamah Agung no.149K/Pid.Sus/2013 dengan alasan bahwa Terdakwa dapat disebut sebagai penyalahguna narkotika didasarkan fakta bahwa terdakwa baik memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika yang dimaksud.

Terkait dengan Implikasi yuridis terhadap penyalah guna narkotika atas putusan Mahkamah Agung no. 149k/pid.sus/2013 dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dikenakan pasal 112 dan tidak dikenakan Pasal 127 dan Pasal 103 dapat dianggap sebagai bukan penyalah guna Narkotika, karena dengan dikenakannya Pasal 112 terhadap terdakwa mengakibatkan terdakwa yang seharusnya mendapatkan hak untuk melakukan Rehabilitasi sebagai langkah pengobatan tidak dapat melaksanakan rehabilitasi sebagai bagian dari masa pembedaan seperti yang dinyatakan pada pasal 103 Undang-undang Narkotika.

SUMMARY

Dandi Wijaya, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, May 2021, Decidendi Ratio of Judges in the Supreme Court Decision Number 149k / Pid.Sus / 2013 concerning Narcotics Abuse, Dr. Setiawan Noerdayasakti, S.H., M.H. , Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

In this research paper the author raises a problem that is motivated by the existence of two articles which are considered multiple interpretations and have unclear formulas, namely Article 112 and Article 127 of the Narcotics Law. In Article 112 does not distinguish between abusers of narcotics used for themselves and abusers of narcotics which in this case fulfill the elements of "possessing, keeping, controlling, and providing" for others. So that the coverage in article 112 can be said to be broader than the meaning of abuser in article 127. And it makes it easier for Article 112 to ensnare narcotics abusers. The author, in this case, raised the case on behalf of the defendant Julie Munthe to be the object of research that needed to be written and researched because in the Supreme Court's decision there was a judge who submitted a Dissenting opinion (DO). And this can provide an overview of how Judges examine, try and decide cases related to Narcotics abuse with several perspectives.

Based on the cases, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the Decidendi Ratio of judges in deciding the conviction of narcotics abusers in the decision number.149K / Pid.Sus / 2013? (2) What are the juridical implications for narcotics abusers based on the Supreme Court decision Number. 149K / Pid.Sus / 2013?

Then the writing in this research paper uses the normative juridical method with the statute approach and the case approach. The legal materials used are in the form of primary, secondary and tertiary legal materials with the technique of tracing legal materials using literature studies and analyzing the legal materials using deduction and interpretation methods.

From the results of the research with the method, the writer obtained answers to the existing problems that the Decidendi Ratio of judges in deciding the conviction of narcotics abusers in the Supreme Court decision number 149K / Pid.Sus / 2013 is that the judge looks more at how the formulation of actions in Article 112 of the Law -The Narcotics Law has been fulfilled based on the discovery of the Narcotics evidence of the type of methamphetamine weighing 0.1 grams fulfills the formulation of the Article that the perpetrator has, keeps or controls the Narcotics Category I. And the Judge considered that the perpetrator was not a Narcotics abuser based on the information that at the time of the search the Defendant was not consuming or using Narcotics. Furthermore, the dissenting opinion (dissenting opinion) in the Supreme Court decision no.149K / Pid.Sus / 2013 on the grounds that the Defendant could be called a narcotics abuser based on the fact that the defendant both possessed, controlled and kept narcotics intended for personal consumption, and test results. The Defendant's urine was positive for the Narcotics in question.

The juridical implication of narcotics abusers on the Supreme Court decision number 149k / pid.sus / 2013 it can be concluded that a person who is subject to Article 112 and not subject to Article 127 and Article 103 can be considered as not an abuser of Narcotics, because the imposition of Article 112 on the defendant resulted in the defendant who should have received the right to carry out rehabilitation as a treatment step. cannot carry out rehabilitation as part of detentionas periods stated in article 103 of the Narcotics Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi masyarakat pada era globalisasi ini lambat laun mengalami perkembangan, dimana perkembangan tersebut selalu diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma tersebut yang semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tersebut disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Masyarakat dan Pemerintah berusaha mengadakan pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi ada kalanya berdampak negatif tidak selalu berdampak positif. Bahkan dengan adanya kemajuan teknologi juga meningkatkan beberapa masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang harus mampu menciptakan penanggulangan tindak kejahatan, khususnya dalam kasus Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Narkotika merupakan suatu obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika pada dasarnya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah opium¹. Namun di sisi lain Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan secara seksama. Sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong

¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3

panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah Sosial Narkoba yaitu Narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya sering diucapkan dengan istilah Narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya Ganja, Kokain, Heroin, Pil koplo, Sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Banyak orang telah mendengar kata 'narkoba', namun masih banyak orang yang tidak dapat menjelaskan secara benar istilah dari Narkoba. Walaupun demikian, yang jelas semua orang dewasa mengenal narkoba. Narkoba merupakan barang haram atau tidak dapat digunakan tanpa izin pihak yang berwenang.

Pengertian narkoba menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi Smith Kline dan French Clinical di Amerika Serikat. Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkotika. Pada konsideran UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat

² Teks.co.id "Narkoba : Pengertian Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Serta Jenis – Faktor – Tanda Gejala – Akibat – Dampak" dikutip dari <https://teks.co.id/pengertian-narkoba-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-jenis-faktor-tanda-gejala-akibat-dampak/> (Diakses pada 10 oktober 2020)

Pengaturan mengenai Narkotika sendiri dalam sejarah Hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda hanya terdapat dalam *Verdovende Middel en Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)*.³ Namun aturan tersebut dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika ke Negara Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan *Resolusi The United Nations Economic and Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*.⁴ Berdasarkan hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*⁵. Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkotika telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkotika saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki dan mempengaruhi semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Indonesia.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas Narkotika secara internasional, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal namun telah menyebar dan mengarah sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para

³ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm.11

⁴ Ibid

⁵ Ibid

pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan dalam arti negara lain. Oleh karena itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan atau elemen masyarakat baik dari generasi muda hingga tua maupun dari lapisan masyarakat miskin hingga kaya. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa yang diharapkan membawa negara Indonesia ke lebih baik. Penyalahgunaan narkoba juga menjadi faktor pendorong meningkatnya peredaran gelap yang semakin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap sangat diperlukan mengingat perkembangan informasi, komunikasi, dan transportasi dalam era globalisasi saat ini mengalami kemajuan yang pesat.⁶

Penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak kasus-kasus yang mendapat putusan oleh hakim. Dengan demikian maka penegakan hukum tersebut diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun dalam kenyataannya semakin intensif dalam melaksanakan penegakan hukum, maka semakin meningkat pula perdagangan gelap dan peredaran narkoba tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang di Indonesia yang mengatur masalah narkoba juga telah disusun dan diberlakukan, namun kejahatan yang menyangkut narkoba masih belum bisa diredakan dengan optimal.

Pada kasus-kasus narkoba yang ada di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, yaitu Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dari ketiga pasal dalam Undang-undang tersebut, terdapat dua pasal yang dinilai multitafsir dan memiliki ketidakjelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkoba.

⁶ Lydia Harlina Marton, 2006, Membantu Pencandu Narkoba dan Keluarga, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1

Pasal 112 UU Narkotika :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pada pasal 112 tersebut tidak membedakan antara penyalah guna narkotika yang digunakan untuk diri sendiri dengan penyalah guna narkotika yang dalam hal ini memenuhi unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan' untuk orang lain. Sehingga cakupan dalam pasal 112 dapat dikatakan lebih luas dibandingkan dengan makna penyalahguna dalam pasal 127. Dan mengakibatkan pasal 112 lebih mudah menjerat pelaku penyalah guna narkotika.

Keberadaan unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai' dalam pasal 112 menyebabkan penyalah guna akan mudah dijerat pidana penjara. Sebab, secara otomatis penyalah guna pasti memenuhi unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika walaupun sifat dari keberadaan unsur tersebut bersifat alternatif. Dan dikarenakan dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana formil, maka meski unsur delik itu tidak memuat unsur *mens area* yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut maka setiap orang dapat dengan mudah dijerat dengan pasal tersebut.

Dan jika melihat fakta di Indonesia, Penegak hukum seringkali menggunakan pasal 112 tersebut untuk menjerat penyalah guna narkotika. Dan seharusnya pasal tersebut hanya berlaku bagi pemilik narkotika yang keberadaan Narkotika tersebut diperuntukkan untuk orang lain. Sebab, Pasal 112 UU Narkotika memuat frasa "memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan" narkotika. Karenanya, menurut penulis penyalah guna narkotika lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 Undang-undang Narkotika dan wajib untuk dilakukan rehabilitasi.

Dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.⁷

Kemudian, Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba menyebutkan jika penyalah guna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.⁸

Bila membandingkan pasal-pasal tersebut, seharusnya terdapat perlakuan berbeda antara pengedar dan penyalah guna narkoba. Sayangnya penegak hukum lebih banyak menjerat Pasal 112 terhadap penyalah guna karena lebih mudah pembuktiannya.

Kondisi tersebut berakibat penyalah guna narkoba tidak memiliki kesempatan memulihkan ketergantungannya. Dengan tidak pulihnya ketergantungan tersebut, berpotensi penyalah guna menggunakan/memakai narkoba kembali di dalam penjara. Akibatnya, praktik jual beli narkoba semakin subur, bahkan di dalam penjara sekalipun.

Maka dari itu, pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan pidana dengan hukuman yang singkat, sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Dan seorang yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkoba dapat dengan mudah dikenakan pasal 112 yang lebih menekankan kepada pelaku kejahatan Narkoba layaknya seorang Pengedar. Dan hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang relatif lama dan menimbulkan ketidakadilan.

Seperti contoh kasus pada Putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013. Pada kasus tersebut permohonan kasasi yang dimaksud yaitu permohonan kasasi jaksa terhadap Julie Munthe berusia 40 tahun yang merupakan warga Aceh Tengah. Julie Munthe ditangkap polisi pada 17 Maret 2012 di rumahnya atas informasi seseorang yang dirahasiakan. Saat proses penggebrekan, terdakwa tengah menonton televisi dan ditemukan dua paket jenis sabu yang dimasukan ke kotak bedak dan dimasukan ke

⁷ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 127

⁸ Ibid.

dalam kantong celana. Atas temuan tersebut, Terdakwa Julie Munthe disidangkan di Pengadilan Negeri Takengon. Jaksa mendakwa Julie Munthe dengan pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1.

Lalu pada tanggal 25 September 2012, jaksa menuntut Terdakwa Julie Munthe dengan tuntutan 4 tahun penjara karena dinilai sebagai pengedar narkoba.

Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara karena Julie terbukti telah mengonsumsi narkoba bagi diri sendiri sesuai pasal 127 ayat 1 Undang-undang Narkotika. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 28 November 2012. Atas vonis tersebut, jaksa lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tingkat kasasi inilah Mahkamah Agung terbelah dalam memutus kasus tersebut. Duduk sebagai ketua majelis yaitu Dr Imron Anwar dengan anggota Dr Andi Samsan Nganro dan Dr Salman Luthan. Dalam Putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013 Dr Imron Anwar dan Dr Andi Samsan Nganro sepakat bahwa Julie Munthe harus dikenakan pasal 112 ayat 1 dan harus dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Adapun menurut Hakim Agung Salman menilai Julie Munthe harusnya dikenakan pasal 127 ayat 1 dan mengajukan *dissenting opinion (DO)*. Atas perbedaan pendapat itu, lantas dilaksanakan voting yang mengakibatkan Hakim Agung Salman kalah suara dan Julie Munthe akhirnya harus dipenjara 4 tahun.

Terkait pasal 112 ayat 1 Undang-undang Narkotika tersebut, Mahkamah Agung menyatakan jika pasal tersebut merupakan pasal yang mudah menjerat siapapun. Di mana banyak pemakai narkoba yang dihukum 4 tahun penjara sehingga menyebabkan penjara pun penuh.⁹

Bahwa ketentuan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut merupakan ketentuan yang mudah menjerat siapapun atau sering disebut sebagai pasal karet. Dimana perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu

⁹ Ari. "Pemakai Tapi Divonis Pengedar Narkoba, Hakim Agung Salman Luthan DO". Detik News. 2014. dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-2660278/pemakai-tapi-divonis-pengedar-narkoba-hakim-agung-salman-luthan-do>. (diakses pada 12 Oktober 2020)

adalah sebuah kekeliruan dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.

Kemudian, pada Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Narkotika menyebutkan jika penyalah guna narkoba terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai isi dari undang-undang tersebut.

Kondisi tersebut berakibat penyalah guna narkoba tidak memiliki kesempatan memulihkan ketergantungannya melalui Rehabilitasi. Mengingat bahwa Rehabilitasi ini adalah bagian dari suatu sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilaku pelaku agar menjadi lebih baik dengan melakukan pembinaan dengan melatih kemampuan-kemampuan kreatifitas yang berdampak positif.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang tersebut berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Di mana pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Dan Fenomena ini tentunya semakin menepis harapan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba secara tuntas di Indonesia.

Penulis dalam hal ini mengangkat kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 untuk dijadikan objek penelitian yang perlu ditulis dan diteliti dikarenakan kasus tersebut sudah sampai di tingkat Kasasi dan dalam kasus tersebut penulis berpendapat bahwa terdapat perbedaan putusan dan pertimbangan di tingkat pertama dan di tingkat banding terhadap putusan di tingkat kasasi. Selain itu juga dalam putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi terdapat hakim yang mengajukan *Dissenting opinion (DO)*. Dan hal tersebut dapat memberikan gambaran

¹⁰ Carlina Russel, Jurnal Karya Ilmiah, Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013, hal- 9.

bagaimana Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus kasus terkait penyalahgunaan Narkotika dengan beberapa perspektif.

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini. Maka hal tersebut menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan dengan judul: Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 Tentang Penyalah Guna Narkotika

B. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian digunakan untuk memberikan jaminan bahwa penelitian yang dilakukan tidak memiliki kemiripan atau sama dengan penelitian terdahulu yang pernah ada. Orisinalitas penelitian ini juga menjamin kontribusi dalam pengembangan teoretik di bidang hukum pidana khususnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengkaji dan menangani kasus penyalahgunaan Narkotika. Pembaruan dalam penelitian ini terdapat dalam bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Pasal 112 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pernah ada terkait objek yang dikaji yaitu tentang Penyalahgunaan Narkotika. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pernah ada yaitu terkait fokus dan bentuk dari objek yang dikaji.

Orisinalitas penelitian yang dilakukan ini secara lengkap disajikan pada tabel 1 dibawah.

Tabel.1

No	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Mohammad Periansyah Arifin, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No:	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Korban Penyalahgunaan

		14/Pid. B/2014/PN. Bkl), Tahun 2015	Narkotika Golongan I menurut putusan Pengadila Kabupaten Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl ? 2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl telah memenuhi ketentuan dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika?
2	Meylani Putri Utami , Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Tahun 2016	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan No. 5 16/Pid.Sus/2015/PN.Mks?

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Periansyah Arifin dan Meylani Putri Utami yaitu mengenai penerapan hukum pidana materiil terkait penyalahgunaan Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Akan tetapi fokus kajian yang dikaji dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Periansyah Arifin dan Meylani Putri Utami hanya membahas bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fokus kajian yang terdapat dalam penelitian ini terkait bagaimana Ratio Decidendi Hakim Agung terhadap penyalah guna Narkotika dalam pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dinilai bersifat multitafsir dan menjadi Pasal yang mudah menjerat seseorang berdasarkan kasus Narkotika yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Pid.Sus/2013.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Ratio Decidendi hakim dalam memutus pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika pada putusan no.149K/Pid.Sus/2013?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap penyalah guna narkotika atas putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Ratio Decidendi hakim dalam memutus pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika pada putusan no.149K/Pid.Sus/2013.
2. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana implikasi yuridis terhadap penyalah guna narkotika atas putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoretik di bidang hukum pidana khususnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengkaji dan menangani kasus Penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal ini, kasus penyalahgunaan narkotika mengalami berbagai permasalahan dalam peradilannya sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dianggap kurang jelas, menambah pengetahuan bagaimana prosedur perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap penyalahguna Narkotika. Serta Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a) Mahasiswa yang berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang membahas mengenai bagaimana Hakim dalam memutus kasus terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika
- b) Praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum) terutama terhadap hakim sebagai wakil Tuhan di bumi dalam memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan di Indonesia.
- c) Kalangan akademisi agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

"doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulity and, perhaps, predicts future development."

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹¹

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

b) Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹²

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 32

¹² Ibid, hlm. 93

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³ Pendekatan perundang-undangan dalam penulisan ini yang dikaji adalah terkait dengan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan beberapa Peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian pendekatan kasus dalam penulisan ini yang dikaji adalah kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Julie Munthe bin Mustafa Munthe dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.sus/2003.

c) Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Antara lain sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam Pasal 112 dan Pasal 127
 - d. Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Pid.Sus/2013
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010
- TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN
PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**

¹³ Ibid., hlm.24

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan Narkotika di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku Kepustakaan
- b. Makalah Ilmiah
- c. Jurnal Ilmiah
- d. Artikel Ilmiah

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Situs internet yang berkaitan dengan Narkotika

d) Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik penelusuran bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.¹⁴ Teknik tersebut berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyalahguna narkotika dalam Pasal 112 dan Pasal 127.

¹⁴ Ibid., hlm.21

e) Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Pid.Sus/2013

Kemudian setelah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dilanjutkan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penafsiran Gramatikal

Dalam buku yang ditulis Yudha Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti

¹⁵ Ibid., hlm. 47

perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi ada kalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.¹⁶ Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.¹⁷ Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

f) Definisi Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala-gejala tersebut. Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis akan mencantumkan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

¹⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.9

¹⁷ Ibid, hlm.11

1. *Ratio Decidendi* Hakim dapat diartikan sebagai alasan dalam pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan.
2. Putusan Hakim atau Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis .
4. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni "*narkē*" yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik seperti ketagihan dan kerusakan mental seperti hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan atau keinginan si pemakai untuk berbuat hal-hal yang menyimpang.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "Narkoties", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.¹⁸

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan dengan dimasukkan ke dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pengguna. Pengaruh tersebut antara lain:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi

¹⁸ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku belum memadai sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Smith Kline dan french Clinical staff dalam buku yang disusun Taufik Makarao membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut :¹⁹

"Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)."

"Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein,heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone)."

Hari Sasangka menjelaskan bahwa definisi Narkotika berdasarkan biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.²⁰

M. Ridha Ma'roef mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :²¹

¹⁹ Moh. Taufik Makarao. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.

²⁰ Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.

²¹ Ibid

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau nercotic and dangerous drugs.

2. Jenis-jenis Narkotika

Berkaitan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

a) Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan I terdiri dari :

- 1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya

mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

3) Opium masak terdiri dari :

a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4) Heroin

Heroin atau *diacetyl morpin* adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya yang dilakukan di laboratorium dengan cara acetalasi dengan aceticanhydrida. Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat

b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni

c) Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya

d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

5) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

6) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

7) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

8) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina

9) Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :

(a) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer

(b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok

(c) Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok

(d) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung

(e) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun²²

10) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

11) Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

12) Dan lain sebagainya

b) Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan II terdiri dari :

1) Morphin

Kata "morphin" itu berasal dari bahasa Yunani "*Morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa *play* di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan.

Morphin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

²² Hari Sasangka, 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.

a. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi

b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh

c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan

- 2) Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
- 3) Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 4) Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
- 5) Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 6) Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]- 4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
- 7) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
- 8) Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
- 9) Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
- 10) Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
- 11) Benzilmorfina : 3-benzilmorfina

c) Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan III terdiri dari :

1. Asetildihidrokodeina
2. 2.Dekstropropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida

B. Kajian Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Istilah "penyalahgunaan" berasal dari kata dasar "salah guna" yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut:

"proses, cara, perbuatan menyalahgunakan"

Sementara Salim dan Salim dalam bukunya merumuskan bahwa :

*"Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya"*¹²³

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan

¹²³ Salim, Peter, & Yenny Salim. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

tersebut. Dan hanya menjelaskan istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, padahal pada dasarnya fungsi dari obat narkoba adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Dan apabila orang yang tidak memiliki sakit yang harus diobati dengan obat narkoba dan secara melawan hukum dengan mempergunakan narkoba, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

2. Faktor – faktor Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Dr.Graham Blin, penyalahgunaan narkoba dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

a) Faktor Internal

Penyalahgunaan yang terjadi karena adanya faktor dari dalam dirinya sendiri, Antara lain:

- a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
- b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
- c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
- d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
- e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
- f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
- g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
- h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

b) Faktor Eksternal

Penyalahgunaan yang terjadi karena adanya faktor dari orang lain atau lingkungan luar, antara lain:

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif merupakan usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam lingkungan keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.²⁴

3. Tindak Pidana Narkoba

Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan suatu ketentuan pidana khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa semua tindak

²⁴ Ruby hardiati Jhony. 2000.diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkoba, Purwokerto. Fakultas Hukum.Unsoed.

pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁵

Penggunaan narkoba secara legal hanya bagi kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.²⁶

4. Jenis-jenis tindak Pidana Narkoba

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkoba dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkoba
Dimana tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli
Narkoba Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkoba.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan
Narkoba Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak

²⁵ Supramono, G. 2001. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta

²⁶ Soedjono Dirjosisworo. 1990. hukum narkoba di Indonesia. Bandung .PT. citra Aditya bakti.

melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

- "Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."²⁷*
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
 - e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
Dalam hal tindak pidana ini orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
 - f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi
Pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika Kemudian untuk dapat dipublikasikan. Sedangkan Pasal 46 UU Narkotika memiliki syarat harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
 - g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika
Barang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

²⁷ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 139

Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur atau belum genap berusia 18 tahun

Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar atau pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

C. Kajian Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan dalam belanda: *vonnis*; *vonnis een uitspreken*; Dalam bahasa inggris: *verdict*, *decision*; Dalam bahasa Latin: *veredictum* adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²⁸

²⁸ M.Natsir Asnawi, Hermeunetika Putusan Hakim, (yogyakarta : UII Press, 2014), hal. 13

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 1 butir ke 11 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²⁹

M.Natsir Asnawi dalam bukunya “Hermeunetika Putusan Hakim” menjelaskan bahwa Putusan sebagai produk pengadilan pada dasarnya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-konstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³⁰

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tertera pada Pasal 1 angka (8) seorang “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.³¹ Oleh karena fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah :

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

²⁹ Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014), hal. 178

³⁰ Asnawi, Hermeunetika Putusan..., hal. 4

³¹ Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014), hal. 177

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³²

Andi Hamzah dalam bukunya "Pengantar Hukum Acara Pidana Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana" menjelaskan bahwa pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.³³

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHP, yang menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".³⁴

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

³² Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

³³ 1 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 167.

³⁴ Pasal 183 KUHP

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

1) Alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan terdakwa³⁵

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menurut Andi Hamzah³⁶, ada 5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

- a. Justisialis hukum yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu diadilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
- b. Penjiwaan hukum dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
- d. Totalitas hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
- e. Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka

³⁵ Pasal 184 KUHAP

³⁶ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 101.

yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak dihukumnya si pelaku, Dan dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap.

Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim dalam buku Lilik Mulyadi yang berjudul "Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan" adalah:

"Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara"³⁷

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah "hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan."³⁸

³⁷ Lilik Mulyadi (2007) Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan. (Mandar Maju: Bandung. 2007) Hal. 127

³⁸ Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010: hlm, 23

Hakim dalam menentukan hukuman dalam suatu kasus yang dihadapkan padanya diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan terhadap kasus tersebut sudah benar dan tepat menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti itu maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk mendalami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan. Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*.

Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutuskan suatu perkara pidana, sedangkan penetapan hakim ada berhubungan dengan suatu permohonan yang ditujukan pada hakim, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.³⁹

Pengertian putusan juga terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut tata cara yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴⁰

2. Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk

³⁹ Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45.

⁴⁰ KUHP Pasal 193

umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan merupakan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela yang bukan merupakan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.⁴¹

Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama-sekali.⁴²

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

⁴¹ Ibid, hlm.47.

⁴² Siadari, Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusanhakim.html> diakses pada tanggal 10-02-2021 Pukul 15:00 WIB.

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan hakim yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁴³ Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.⁴⁴

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.⁴⁵

2) Putusan Pelepasan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".⁴⁶

3) Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan

⁴³ KUHP Pasal 191 ayat (1)

⁴⁴ Ibid. hlm 137.

⁴⁵ KUHP Pasal 183

⁴⁶ KUHP Pasal 191 ayat (2)

perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain.⁴⁷

Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 84 KUHP yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- b. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.⁴⁸

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap

⁴⁷ KUHP Pasal 191 ayat (1)

⁴⁸ Ibid, Pasal 84

pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.⁴⁹

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Antara lain:⁵⁰

a. Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

1. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.
2. Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b. Syarat Materiil

1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

3. Asas-asas dalam Putusan Hakim

a. Asas musyawarah majelis

Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :

"Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia".⁵¹

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap

⁴⁹ Ibid, hlm.144.

⁵⁰ KUHAP, Pasal 143

⁵¹ Pasal 14 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Narkotika

kasus yang sedang diperiksa dan diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis tersebut, hakim diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional.

b. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Putusan yang dikategorikan seperti itu merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."⁵²

c. Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut oleh penuntut umum dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*).

Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa putusan hakim yang melebihi tuntutan masih dapat dibenarkan sepanjang putusan dimaksud masih selaras atau memiliki relevansi yang signifikan dengan gugatan penggugat.

d. Asas keterbukaan

Subtansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan

⁵² Ibid, Pasal 50

akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (partial). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

e. Putusan harus tertulis

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

"Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang".

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.⁵³

4. Fungsi Putusan Hakim

Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realisme hukum).⁵⁴ Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri. Berikut beberapa fungsi putusan hakim :

a. Fungsi kontrol sosial

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel yang bersifat sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama akan menghasilkan suatu kaidah

⁵³ Asnawi, *Hermeunetika Putusan...*, hal. 43-49

⁵⁴ M.Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (yogyakarta : UII Press, 2014)

hukum yang konsisten dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol sosial karena menjadi barometer bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

b. Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan antara para pihak layaknya hukum perdata, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

c. Fungsi *integrating* berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda antara para pihak, dan juga kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (melalui putusan hakim) berfungsi sebagai instrumen yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

d. Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharuan, tidak semata-mata hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum), melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan nilai keadilan di masyarakat.

Dalam tatanan praktis, putusan hakim berfungsi memperbaharui perilaku dan nilai hidup yang hidup di masyarakat. Pembaharuan perilaku dan nilai itu lebih disebabkan oleh tuntutan dan ekspektasi masyarakat akan terwujudnya keadilan. Nilai-nilai tertentu yang saat ini hidup di masyarakat mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang ada, karena itu perlu adanya perubahan, salah satunya melalui putusan pengadilan.

e. Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Fungsi rekayasa sosial berkaitan dengan pembangunan pada masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik.

D. Kajian Umum Tentang Ratio Decidendi Hakim

1. Pengertian Ratio Decidendi

Pertimbangan hukum hakim merupakan argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio decidendi*.⁵⁵

Ratio decidendi atau *reasoning* juga diartikan sebagai pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.⁵⁶

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi. ⁵⁷ Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut. ⁵⁸ Dalam menemukan *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio*

⁵⁵ Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim*, Skripsi, 2015, 5.

⁵⁶ Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim*, Skripsi, 2015, 5.

⁵⁷ I.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cetakan Ketiga, hlm. 475

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress), hlm. 119

decidendi tersebut dapat ditemukan pada konsideran “menimbang” pada “pokok perkara.”

2. Syarat Ratio Decidendi Hakim

Alasan hakim atau *Ratio Decidendi* Hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Dan dalam Putusan Pengadilan tersebut harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Baik keperluan praktik maupun kajian akademis.

Ratio decidendi harus didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

3. Tujuan Ratio Decidendi Hakim

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa, dengan adanya tujuan *Ratio decidendi* atau

reasoning tersebut dapat dijadikan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁵⁹

Pada umumnya, fungsi *Ratio decidendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replik dan duplik percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.

4. Hubungan Ratio Decidendi Dengan Putusan Hakim

Hubungan ratio decidendi dengan Putusan Hakim sangatlah erat. Didalam Putusan hakim mengandung argumentasi hakim (*ratio decidendi*) yang berisi pernyataan-pernyataan hakim, wajib untuk disertakan. Ratio decidendi hakim harus didasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perkara yang ditanganinya. Sehingga putusan tersebut suatu bentuk akta penutup dari suatu proses perkara mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.⁶⁰

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.⁶¹ Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁶²

⁵⁹ Pambudi, Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN. Smg), Skripsi, 5.

⁶⁰ 3 I Rubini, Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, 105.

⁶¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 94

⁶² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1)

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yang disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan.

Dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.⁶³

5. Hubungan *Ratio Decidendi* Dengan Metode Penafsiran Hukum

Hubungan *Ratio Decidendi* dengan metode penafsiran hukum merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *Ratio decidendi* tidak akan pernah ada sebelum hakim melakukan metode penafsiran hukum. Dengan adanya metode penafsiran hukum, hakim dapat menggali hukum yang sudah ada dalam Undang-Undang.

Setelah melakukan metode penafsiran hukum hakim menemukan hukumnya suatu perkara, hingga munculah *ratio decidendi*. Hal tersebut dapat menghindarkan hakim dalam kekeliruan menetapkan hukum suatu perkara.

Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu.

Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan

⁶³ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang, hlm. 129

putusan yang saling berlawanan yang menentukan *ratio decidendi* putusan tersebut.⁶⁴

Menurut Goodheart, *Ratio Decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil.⁶⁵ Fakta materiil tersebut diperhatikan dengan baik oleh hakim untuk melakukan interpretasi fakta tersebut. Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran "menimbang" pada "pokok perkara".

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun seperti dijelaskan sebelumnya, hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang atau penerapan hukum semata (*la bouche de la loi*), Namun peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang pernah terjadi sebelumnya yang terkadang sudah tidak relevan, tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, dan dimana hal ini disebut dengan *obiter dictum*. Ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *ratio decidendi*, pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.⁶⁶ Pada dasarnya dalam *ratio decidendi* hakim berpacu dalam peraturan perundang-undangan, yang memuat aturan terhadap kasus *a quo* mengingat yang mengingat hakim tidak dapat hanya bersumber pada putusan sebelumnya atau yurisprudensi.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress), hlm. 123

⁶⁵ Ian McLeod, 1999, *Legal Method*, (London, Macmillan), hlm. 144

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Sinar Grafika: Jakarta), hlm. 54

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 149K/PID.SUS/2013

Berbicara mengenai *Ratio Decidendi* dalam pertimbangan hakim artinya tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu jenis pendekatan saja, baik itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filosofis saja, maka putusan yang dihasilkan menurut penulis tidak sepenuhnya dapat dikatakan memenuhi keadilan. Ketiga jenis pendekatan tersebut seharusnya digunakan oleh Hakim secara bersama-sama dan proporsional sehingga Putusan yang dihasilkan dapat dikatakan proposional.

Menurut Achmad Ali, Terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1. Pendekatan Normatif

Dalam pendekatan normatif Hakim lebih memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh dan mencakup seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).

2. Pendekatan Empiris atau *Legal Impirical*

Dalam Pendekatan empiris Hakim lebih memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan, dan seperangkat perilaku.

3. Pendekatan Filosofis

Dalam Pendekatan filosofis Hakim lebih memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana 2009. hal.178

Berikut merupakan uraian mengenai pendekatan-pendekatan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana:

a. Pertimbangan Normatif / Yuridis

Terdapat perbedaan Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Berdasarkan maksud atau tujuan tersebut, hukuman yang dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan tersebut. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum tersebut diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan adanya kepastian hukum.

Berdasarkan kasus yang diambil dalam penelitian ini hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba dengan berdasarkan pertimbangan Normatif atau yuridis yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pada pasal 112 dan 127 dan pasal-pasal terkait.

b. Pertimbangan Sosiologis

Dalam Pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁶⁸ Dalam arti lain Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat).

⁶⁸ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.⁶⁹

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial dari pelaku tindak pidana atau yang berkaitan seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Dalam Pasal 54 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 2019, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: ⁷⁰

- 1) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- 2) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- 3) sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- 4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- 5) cara melakukan Tindak Pidana;
- 6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- 7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- 9) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- 10) pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- 11) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

c. Pertimbangan filosofis

⁶⁹ M. Solly Lubis, "Landasan dan Teknik Perundang-undangan", (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

⁷⁰ Rancangan KUHP Nasional Tahun 2019 Pasal 54 ayat (1)

Yang dimaksud dari pertimbangan Filosofis hakim adalah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya bahwa pertimbangan filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.⁷¹ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.⁷² Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu pihak. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Dalam penelitian ini penulis Seperti contoh kasus pada Putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013. Pada kasus tersebut permohonan kasasi yang dimaksud yaitu permohonan kasasi jaksa terhadap Julie Munthe berusia 40 tahun yang merupakan warga Aceh Tengah atas kasus Tindak Pidana Narkotika.

Julie Munthe disidangkan di Pengadilan Negeri Takengon atas temuan Narkotika jenis Shabu-shabu. Jaksa mendakwa Julie dengan Dakwaan Primair pasal 112 ayat 1 tentang tindak pidana narkotika dan dakwaan subsidair pasal 127 ayat 1 tentang penyalahguna narkotika. Adapun pasal 112 ayat 1 menyatakan:

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 dan paling banyak Rp 8 miliar."*⁷³

⁷¹ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

⁷² Bagir Manan, "Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia", (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), hlm 14-17

⁷³ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112

Sedangkan dalam pasal 127 ayat 1 (a) menyatakan:

"Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;⁷⁴

Dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 79/Pid.B/2012/ PN.Tkn. tanggal 2 Oktober 2012 Hakim Menyatakan Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair. Dan menyatakan Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 162/Pid/2012/ PT.Bna. tanggal 28 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Oktober 2012 No79/PID.B/2012/PN-Tkn yang dimintakan banding tersebut.

Dengan adanya putusan tersebut Jaksa mengajukan Kasasi dengan alasan bahwa Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak cermat membaca pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam menjatuhkan putusan. Yang mana dalam uraian unsur yuridis dalam dakwaan Primair, tepatnya pada unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";

Pada tingkat kasasi inilah Mahkamah Agung terbelah dalam memutuskan kasus tersebut. Duduk sebagai ketua majelis yaitu Dr Imron Anwari dengan anggota Dr Andi Samsan Nganro dan Dr Salman Luthan. Dalam Putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013 Dr Imron Anwari dan Dr Andi Samsan Nganro sepakat bahwa Julie Munthe harus dikenakan pasal 112 ayat 1 dan harus dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Adapun menurut Hakim Agung Salman menilai Julie Munthe harusnya dikenakan pasal 127 ayat 1 dan mengajukan *dissenting opinion (DO)*. Atas perbedaan pendapat itu, lantas

⁷⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127

dilaksanakan voting yang mengakibatkan Hakim agung Salman kalah suara dan Julie Munthe akhirnya harus dipenjarakan 4 tahun.

Penulis dalam hal ini mengangkat kasus tersebut untuk dijadikan objek penelitian yang perlu ditulis dan diteliti dikarenakan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat hakim yang mengajukan *Dissenting opinion (DO)*. Dan hal tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus terkait penyalahgunaan Narkotika dari beberapa perspektif.

Berikut adalah kronologi dari kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Julie Munthe.

1. Kronologi

Berikut merupakan Kronologi kasus tindak pidana Narkotika dalam Putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013 : ⁷⁵

Kronologi berawal ketika anggota satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendapat informasi dan masyarakat yang layak dipercaya, bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Lintang Lorong Kala Sigo, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggerebekan di rumah tersebut, pada saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut ditemukan Terdakwa berada di dalam rumah itu sendirian sambil menonton televisi. Setelah itu anggota satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat kampung. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik transparan warna putih di dalam kotak bedak yang disimpan Terdakwa di dalam celana yang dipakai Terdakwa, tepatnya di dalam kantong celana bagian kiri.

Bahwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Barang Bukti Cabang Medan, 2 (dua) paket Narkotika yang terbungkus dengan plastik transparan warna putih di dalam kotak bedak yang disimpan Terdakwa di dalam celana yang dipakai

⁷⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Pid.Sus/2013

Terdakwa, tepatnya di dalam kantong celana bagian kiri yang diduga shabu-shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I. Hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2409/NNF/2012 tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua belas yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan MELTA TARIGAN, M. Si terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka JULIE MUNTHE dan dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka JULIE MUNTHE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik transparan warna putih di dalam kotak bedak yang disimpan Terdakwa di dalam celana yang dipakai Terdakwa, tepatnya di dalam kantong celana bagian kiri tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari ANSAR (DPO).

Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 di rumah Terdakwa sendiri. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Sementara atas hasil Urine Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 yang dilakukan oleh JOHARIYADI yang merupakan PAUR KESEHATAN pada Polres Aceh Tengah dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen ACON terhadap urine Terdakwa dan didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dalam memiliki serta menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwasanya Terdakwa berada dalam pengawasan pihak yang berwenang.

2. Putusan di Tingkat Pengadilan Negeri dan Putusan di Tingkat Pengadilan

Tinggi dan Putusan Tingkat Kasasi

a. Putusan di Tingkat Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 79/Pid.B/2012/ PN.Tkn. tanggal 2 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :⁷⁶

1. Menyatakan Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) kotak bedak warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Dalam memutus kasus pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam pertimbangannya tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Pid.Sus/2013. Hlm 8

⁷⁷ Ibid. Hlm 10

Dalam pertimbangannya yang pertama Hakim menjelaskan definisi dari setiap kata kerja dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

bahwa yang dimaksud dengan kata "memiliki" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual-beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya sementara pengertian "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan "menguasai" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Selanjutnya hakim memberikan pertimbangan bahwa pengertian dan penerapan sub. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Pertimbangan kedua, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayuni Simahate, saksi Hamka Munthe bin Rabil dan saksi H. Hanafia bin M. Nuh di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012, sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lintang Lorong Kala Sigo, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Aceh Tengah saksi Ayuni Simahate telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menonton televisi, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hamka Munthe Bin Rabil dan saksi H. Hanafia Bin M. Nuh telah ditemukan 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik transparan

warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian kiri yang disimpan di dalam kotak bedak warna putih;

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ayuni Simahate barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang disimpan di dalam kotak bedak warna putih, yang mana kotak bedak berwarna putih tersebut berdasarkan keterangan saksi Hamka Munthe Bin Rabil dan saksi Hanafia Bin M. Nuh didapat dari kantong belakang celana Terdakwa bagian kiri;

Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa yang pertama dari sdr. Ansar (DPO) dengan cara diberi dengan cuma-cuma setelah itu yang kedua kalinya Terdakwa beli dari sdr. Ansar (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012, sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintang Lorong Kala Sigo, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap berupa bong yang disambungkan dengan kaca pirex dan dibakar menggunakan mancis hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Sementara atas hasil urine Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 yang dilakukan oleh Johariyadi yang merupakan PAUR KESEHATAN pada Polres Aceh Tengah dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal/ scrinning yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen ACON terhadap urine Terdakwa Julie Munthe Bin Munthe Positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini tidak tepat jika diterapkan terhadap Terdakwa yang pada kenyataannya memang benar pada saat Terdakwa ditangkap narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saudara ANSAR (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil, yang disimpan di dalam kotak bedak berwarna putih

yang terdapat di kantong belakang celana Terdakwa bagian kiri, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Tengah barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui serangkaian proses yang pada tujuan akhirnya akan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, maka dakwaan Primair ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menyatakan perbuatan Terdakwa lebih cenderung melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya jauh lebih rendah dibanding dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdapat pertimbangan Hakim yang tidak jelas khususnya dalam pertimbangan dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Primair tidak terbukti.

Menurut penulis jika dibaca kembali dengan seksama pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan "bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi dalam pertimbangan lain, mengatakan unsur pasal ini tidak terbukti". Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terbukti hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, sementara saksi Ayni Simahate Bin Rabin dan saksi H. Hanafi Bin M. Nuh menyatakan dalam persidangan 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic transparan warna putih yang diduga

Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian kiri yang disimpan di dalam ketak bedak warna putih. Sementara apabila dilihat dari bentuk unsur pasal yang alternatif, maka apabila salah satu unsur saja yang terbukti, unsur pasal itu sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

b. Putusan di Tingkat Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 162/Pid/2012/ PT.Bna. tanggal 28 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:⁷⁸

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Oktober 2012 No79/PID.B/2012/PN-Tkn. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh Majelis Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Oktober 2012 No79/PID.B/2012/PN-Tkn.

Yakni Bahwa atas pertimbangannya Penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan perbuatan Terdakwa lebih cenderung melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya jauh lebih rendah dibanding dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didasarkan dengan adanya perbuatan materiil tersebut adalah sebagai serangkaian suatu proses terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Metamfetamine untuk diri sendiri.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Takengon tersebut.

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Pid.Sus/2013

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 162/ PID/2012/PT.BNA. tanggal 28 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 79/Pid.B/2012/ PN.TKN. tanggal 02 Oktober 2012; MENGADILI SENDIRI putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 162/ PID/2012/PT.BNA. tanggal 28 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 79/Pid.B/2012/ PN.TKN. tanggal 02 Oktober 2012.
3. Menyatakan Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) kotak bedak warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam memutus kasus pada tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi Ayuni Simahathe Hamka Munthe dan H. Hanafia bahwa pada tanggal 17 Maret

2012, sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lintang Lorong Kala Sigo, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Selatan pada saat petugas Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada diri Terdakwa terdapat 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik dalam kotak bedak warna putih tersimpan di kantong celana Terdakwa di bagian kiri;

Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di atas Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba tersebut dan menurut keterangannya Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba pada tanggal 15 Maret 2012, yang dibelinya dari sdr. ANSAR dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga selama 2 (dua) hari tersebut Terdakwa telah menyimpan atau memiliki Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram termasuk Narkoba Golongan I

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelaslah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana terbukti dalam Dakwaan Primair, karenanya pertimbangan Judex Facti adalah salah dalam penerapannya, sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut oleh penulis disimpulkan bahwa dalam memutus kasus tersebut hakim lebih melihat bagaimana rumusan perbuatan dalam Pasal 112 Undang-undang Narkoba telah terpenuhi berdasarkan ditemukannya adanya alat bukti 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik dalam kotak bedak warna putih tersimpan di kantong celana Terdakwa di bagian kiri yang membuktikan bahwa Pelaku telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram termasuk Narkoba Golongan I.

Selanjutnya penulis juga menyimpulkan bahwa Hakim menganggap Pelaku Tidak sebagai penyalahguna Narkoba berdasarkan keterangan dimana pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba tersebut dan menurut keterangannya Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba pada tanggal 15 Maret 2012.

3. *Ratio Decidendi* Hakim Agung dalam memutus pemidanaan pada putusan nomor Putusan Nomor 149K/Pid.Sus/2013

a. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokok kasus dalam Putusan Nomor 149K/Pid.Sus/2013 adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak cermat membaca pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam menjatuhkan putusan. Yang mana dalam uraian unsur yuridis dalam dakwaan Primair, tepatnya pada unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru dalam memberi pertimbangan dengan menyatakan unsur tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Majelis Hakim menyatakan salah satu unsur dalam pasal 112 Undang-undang Narkotika tidak terbukti, dengan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja. sementara saksi Ayni Simahate Bin Rabin dan saksi H. Hanafi Bin M. Nuh menyatakan dalam persidangan 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic transparan warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian kiri yang disimpan di dalam ketak bedak warna putih. Sementara apabila dilihat dari bentuk unsur pasal yang alternatif, maka apabila salah satu unsur saja yang terbukti, unsur pasal itu sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

Dalam hal tersebut Penuntut Umum dengan mengutip yurisprudensi dari Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat dakwaan bukan tuduhan Polisi. Dalam dakwaan Subsidiaritas apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi,

⁷⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Pid.Sus/2013. Hlm 10

berbeda halnya dengan bentuk dakwaan alternatif. Dalam dakwaan berbentuk alternatif, maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

b. Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang seksama terutama dalam hal penerapan hukumnya dan juga dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Julie Munthe. Hukuman yang dijatuhkan Judex Facti tersebut tidak sebanding dengan maksimal ancaman hukuman yang diatur dalam pasal yang didakwakan, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif serta terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena Tindak Pidana narkoba termasuk transnasional crime, yang mana seluruh Negara di dunia sangat memerangi narkoba;

M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" berpendapat bahwa :

Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukum itu masih dalam batas ancaman hukuman maksimum;

Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi;

Berdasarkan uraian di atas maka menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut, "telah keliru dalam melakukan penerapan hukum sehingga putusan yang adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa tidak tercapai dan hukum/ Undang-Undang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan cara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon;

b. Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 149K/Pid.Sus/2013**1) Ratio Decidendi Hakim pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding**

Pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim di pengadilan.

Secara teori, pemidanaan dapat dikatakan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip demikian sejalan dengan asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali undang-undang telah mengaturnya (*nullum delictum sine praveia lege poenale*) sebagaimana pula diatur Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari pelaku tindak pidana dan sekaligus memiliki tujuan sebagai supaya menimbulkan efek penjeratan bagi pelaku kejahatan atau bagi orang lain sebagai peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa.⁸⁰

Hukum pidana yang terkodifikasi dalam KUHP memang tidak menjelaskan secara jelas apa tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga dalam praktek di pengadilan pidana seringkali timbul beragam penafsiran berdasarkan sudut pandang masing-masing penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) karena masing-masing terkadang memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam menangani suatu perkara. Misalnya dalam suatu perkara narkoba, di tingkat kepolisian, pelaku di tangkap dan ditetapkan bersalah melanggar satu pasal, kemudian di pada saat penuntutan jaksa menjerat dengan dua pasal, begitu pula di tangan hakim, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar ketentuan yang dituduhkan. Di dalam pengadilan, hakim adalah pihak yang diberi kewenangan penuh dan sebagai peran utama dalam proses peradilan yang selalu dituntut untuk

⁸⁰ Jeski Wilson & Dian Adriawab DG Tawang ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014. Jurnal Hukum Adigama. Tahun 2020

menegakkan hukum dan keadilan dalam bentuk putusan yang ditanganinya.⁸¹ Putusan hakim harus senantiasa dapat

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.⁸²

Tugas utama hakim adalah menerapkan hukum dengan berlandaskan pada ketentuan hukum pada kasus konkrit dalam bentuk putusan. Dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi hukum positif karena telah secara langsung mengikat pihak-pihak tertentu,⁸³ bahkan putusan hakim yang merupakan produk hukum lembaga yudikatif seringkali dijadikan yurisprudensi.

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- (a) Keterangan Saksi;
- (b) Keterangan Ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk;
- (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat

⁸¹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta 2009, hal.3.

⁸² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 Ayat (1)

⁸³ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoretis, (Yogyakarta: FHUI Press, 2004), hal. 1. 13 Pusi

(3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan. Menurut Bernard Arif Sidartha, proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari Hakim dengan beragam motivering yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem autopoiesis, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.⁸⁴

Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan pengertian "argument" adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat, Sedangkan agumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat.⁸⁵

Dalam memutus kasus pada tingkat pertama dan pada tingkat Banding Majelis Hakim dalam pertimbangannya, oleh penulis disajikan sebagai berikut:

⁸⁴ Bernard Arif Sidartha . Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum .2000 Jakarta : Mandar Maju

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menimbang, Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan Terdakwa yang pertama dari sdr. Ansar (DPO) dengan cara diberi dengan cuma-cuma setelah itu yang kedua kalinya Terdakwa beli dari sdr. Ansar (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012, sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lintang Lorong Kala Sigo, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap berupa bong yang disambungkan dengan kaca pirex dan dibakar menggunakan mancis hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Sementara atas hasil urine Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 yang dilakukan oleh Johariyadi yang merupakan PAUR KESEHATAN pada Polres Aceh Tengah dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal/scrinning yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen ACON terhadap urine Terdakwa Julie Munthe Bin Munthe Positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini tidak tepat jika diterapkan terhadap Terdakwa yang pada kenyataannya memang benar pada saat Terdakwa ditangkap narkoba jenis shabu-shabu tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saudara ANSAR (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket kecil, yang disimpan di dalam kotak bedak berwarna putih yang terdapat di kantong belakang celana Terdakwa bagian kiri, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Tengah barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, yang mana barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui serangkaian proses yang pada tujuan akhirnya akan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim dalam tingkat Pertama dan Banding lebih berpendapat bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa lebih kepada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Hal ini dibuktikan bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Adanya alat bukti berupa shabu-shabu merupakan serangkaian proses yang pada tujuan akhirnya akan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri. Dan juga dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Sementara atas hasil urine Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 yang dilakukan oleh Johariyadi yang merupakan PAUR KESEHATAN pada Polres Aceh Tengah dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal/ scrinning yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen ACON terhadap urine Terdakwa Julie Munthe Bin Munthe Positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa atas pertimbangannya itu Penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menyatakan perbuatan Terdakwa lebih cenderung melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya jauh lebih rendah dibanding dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Menurut pendapat penulis mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara khusus menentukan bahwa setiap korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Di Indonesia

sendiri untuk ketentuan tentang pidana rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pengguna Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang tersebut pasal 54 sampai pasal 59. Dalam pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan :

"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Berdasarkan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebaiknya di rehabilitasi guna mendapatkan perawatan medis dan sosial. Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan untuk pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula.

Definisi yang terdapat pada UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebenarnya bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bisa atau dapat dijatuhi hukuman pidana rehabilitasi, baik itu rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial.

Namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama dan Banding tersebut adalah telah keliru dalam memberi pertimbangan dengan menyatakan unsur tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Jika dibaca kembali dengan seksama pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan "bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi dalam pertimbangan lain, mengatakan unsur pasal ini tidak terbukti". Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terbukti hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, sementara saksi Ayni Simahate Bin Rabin dan saksi H. Hanafi Bin M. Nuh menyatakan dalam persidangan 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic transparan warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian kiri yang disimpan di dalam ketak bedak warna putih.

Sementara apabila dilihat dari bentuk unsur pasal yang alternatif, maka apabila salah satu unsur saja yang terbukti, unsur pasal itu sudah dianggap terbukti secara keseluruhan;

Maka dari itu Penuntut Umum dengan mengutip yurisprudensi dari Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat dakwaan bukan tuduhan Polisi. Dalam dakwaan Subsidiaritas apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, berbeda halnya dengan bentuk dakwaan alternatif. Dalam dakwaan berbentuk alternatif, maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Selanjutnya Pembahasan mengenai absah tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-

nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik, seperti dijelaskan oleh M. Yahya Harahap.⁸⁶

3. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari

⁸⁶ Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan. Edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika

awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian.

Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

2) *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013

Menurut ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menjelaskan terkait masalah putusan hakim dalam menangani suatu perkara harus ada alasan yang menjadi dasar dari sebuah putusan dengan memuat ketentuan pasal yang dilanggar sebelum memutuskan perkara. Selain itu, dalam putusan hakim juga harus membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan pada hukum yang benar dan tepat. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka secara prinsip hakim wajib menerima suatu perkara yang datang padanya dan kemudian dilarang mengadili apa yang tidak dituntut atau memberi putusan lebih dari apa yang dituntut.

Berdasarkan alasan-alasan jaksa penuntut umum yang telah disampaikan dalam Persidangan, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan jaksa penuntut umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi Ayuni Simahathe Hamka Munthe dan H. Hanafia bahwa pada

tanggal 17 Maret 2012, sekira jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lintang Lorong Kala Sigo, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Selatan pada saat petugas Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada diri Terdakwa terdapat 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik dalam kotak bedak warna putih tersimpan di kantong celana Terdakwa di bagian kiri;

2. Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di atas Terdakwa tidak sedang mengonsumsi atau menggunakan Narkoba tersebut dan menurut keterangannya Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba pada tanggal 15 Maret 2012, yang dibelinya dari sdr. ANSAR dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga selama 2 (dua) hari tersebut Terdakwa telah menyimpan atau memiliki Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram termasuk Narkoba Golongan I
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelaslah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana terbukti dalam Dakwaan Primair, karenanya pertimbangan Jdex Facti adalah salah dalam penerapannya, sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Alasan Hakim dalam memutus pemidanaan terhadap Julie Munthe didasarkan berdasarkan perbuatan materiil yang bersesuaian dengan Rumusan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berikut merupakan unsur-unsur dalam pasal 112 :

a. Unsur *Setiap Orang*

Unsur setiap orang yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁷ Dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Dalam kasus ini "setiap orang" yang dimaksudkan adalah terdakwa JULIE MUNTHER BIN MUSTAFA MUNTHER yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. Dan didalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

b. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*

Terkait dengan unsur "Tanpa Hak" dalam hal ini berarti pada diri terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, walaupun ada haruslah disertai dengan izin yang sah dari yang berwenang, sedangkan maksud dari "Tanpa Hak atau

⁸⁷ A.R. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, Hlm 227

Melawan Hukum” berarti ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal tersebut. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang. Dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.⁸⁸ Kata-kata “melawan hukum” terkadang tercantum secara implisit ke dalam rumusan pasal dikarenakan untuk mengantisipasi apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan bisa terkena juga oleh larangan dari pasal Undang-undang yang bersangkutan. Menurut *memorie van toelichting*, dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan beberapa tindak pidana adalah untuk menghadapi kemungkinan jangan sampai orang yang sebenarnya menggunakan haknya dalam melakukan perbuatan itu akan dipidana.⁸⁹ Unsur tanpa hak atau melawan hukum juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan.

c. Unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.44

⁸⁹ Ibid.

Bahwa yang dimaksud dengan kata "**memiliki**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual-beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, Sementara pengertian "**menyimpan**" adalah menaruh di tempat yang aman. Yang dimaksud dengan "**menguasai**" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Dan maksud dari "**menyediakan**" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk.

Keberadaan unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

d. Unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Dalam hal ini adalah terkait Objek dari Jenis Narkotika yang digunakan. Dalam kasus ini yakni Shabu-shabu.

Berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan dalam putusan tersebut Hakim melihat perbuatan Pidana dimana Terdakwa Julie Munthe telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,1 gram.

Dilihat berdasarkan rumusan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan kata "memiliki" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum

diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual-beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya sementara pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut perbuatan terdakwa Julie Munthe bersesuaian dengan rumusan pasal tersebut.

Selanjutnya pengertian dan penerapan sub. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya alat bukti terdapat 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik dalam kotak bedak warna putih tersimpan di kantong celana Terdakwa di bagian kiri dapat memenuhi unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai” dalam pasal 112 Undang-undang Narkotika.

Selanjutnya Hakim menganggap bahwa Pelaku Tidak sebagai penyalahguna Narkotika berdasarkan keterangan dimana pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika tersebut dan menurut keterangannya Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika pada tanggal 15 Maret 2012.

Berdasarkan amar tersebut Hakim berpendapat jika penyalahguna adalah seseorang yang hanya dibuktikan dengan saat penangkapan adalah saat Terdakwa memakai/mengkonsumsi Narkotika dan dibatasi oleh waktu sekian hari yang dalam kasus ini adalah 5 hari. Bahwa

Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika pada tanggal 15 Maret 2012 dan dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Maret 2012.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan batasan waktu seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika namun dalam Undang-undang tersebut hanya menjelaskan pengertian seseorang yang dimaksud sebagai Penyalah Guna antara lain Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Terkait pengertian Penyalah Guna Salim dan Salim dalam bukunya merumuskan bahwa :

"Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya"⁹⁰

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Dan hanya menjelaskan istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal pada dasarnya fungsi dari obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Dan apabila orang yang tidak memiliki sakit yang harus diobati dengan obat narkotika dan secara melawan hukum dengan mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

⁹⁰ Salim, Peter, & Yenny Salim. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

Selanjutnya terkait tidak adanya batasan waktu seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 "TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL Nomor 2 , hanya menjelaskan syarat syarat seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika yang berhak untuk dilakukan Rehabilitasi antara lain :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - 1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram.
 - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - 5) Kelompok Ganja : 5 gram
 - 6) Daun Koka : 5 gram
 - 7) Meskalin : 5 gram
 - 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - 11) Kelompok Fentanil : 1 gram
 - 12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - 13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - 14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - 15) Kelompok Kodein : 72 gram
 - 16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Selanjutnya dalam putusan tersebut Hakim Anggota II/ Pembaca II

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. mengemukakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan fakta ditemukan adanya shabu-shabu pada Terdakwa seberat 0,1 gram yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina ;

2. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, dan alasan kasasi yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana, tidak dapat dibenarkan karena hal itu bukan alasan formal dan obyek kasasi;

Dalam *Dissenting Opinion* atau pendapat berbeda dari Hakim Anggota II/ Pembaca II Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Oleh Penulis disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa Julie Munthe. Putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sesuai dengan rumusan pasal 127 Undang-undang

Nomor 35 tahun 2009 dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Selanjutnya Unsur-unsur dalam Pasal 127 adalah sebagai berikut:

Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun⁹¹

Dalam pasal 1 nomor 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan maksud dari "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" berarti ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal tersebut. Yaitu terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika dengan jenis shabu-shabu saat sebelum tertangkap. Serta dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dalam Berita Acara Pemeriksaan Sementara atas hasil Urine Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 yang dilakukan oleh JOHARIYADI yang merupakan PAUR KESEHATAN pada Polres Aceh Tengah dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal/skrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen ACON terhadap urine Terdakwa dan didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2409/NNF/2012 tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua belas yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan MELTA TARIGAN, M. Si terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka JULIE MUNTHE, dan dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka JULIE MUNTE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran

⁹¹ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat 1a

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Terkait dengan Hakim dalam memberikan putusan terdapat Salah satu proses hukum di pengadilan yaitu masalah pertimbangan hakim karena pertimbangan merupakan salah satu landasan hakim dalam mengambil suatu keputusan.⁹² Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menangani perkara di pengadilan menjadi penentu berat ringannya hukuman bagi terpidana. Hakim juga diberi kebebasan secara mandiri dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

Setidaknya ada 3 (tiga) syarat minimal dalam pertimbangan hakim yaitu pertama pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum yang artinya dalam memutus perkara harus berlandaskan pada hukum positif. Kedua, pertimbangan untuk mewujudkan keadilan karena esensi keadilan merupakan tujuan hukum meskipun dalam faktanya dalam sudut pandang yang berbeda tidaklah sama karena bisa saja adil bagi terpidana tetapi tidak adil bagi korban. Maka dari itu, hakim dalam mengambil keputusan seringkali didasarkan pada pertimbangan filosofis, psikologis, sosiologis dan religius. Ketiga pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan yang artinya kemaslahatan dari suatu pertimbangan hakim sekiranya dapat memberi pembelajaran bagi siapa saja baik dalam perkara perdata maupun pidana.⁹³

Dari teori tersebut Penulis berkesimpulan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Majelis Hakim lebih merumuskan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan keadilan. Hal

⁹² Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hal.33.

⁹³ Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Pada Nilai-Nilai Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2018). Hal. 110.

ini dilihat dari Majelis Hakim dalam *Judex Facti* dan Hakim Anggota II dalam *Dissenting Opinion*-nya lebih menganggap bahwa Terdakwa lebih tepat dikenakan oleh Pasal 127 Undang-undang Narkotika dimana menganggap bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 112 Undang-undang Narkotika tidak tepat jika diterapkan terhadap Terdakwa yang pada kenyataannya memang benar pada saat Terdakwa ditangkap narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Tengah barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, yang mana barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui serangkaian proses yang pada tujuan akhirnya akan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri.

Sedangkan dalam tingkat kasasi pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum yang artinya dalam memutus perkara harus berlandaskan pada hukum positif yang dalam hal ini merumuskan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan Kepastian Hukum. Dimana pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat kasasi dapat disimpulkan bahwa dalam memutus kasus tersebut hakim lebih melihat bagaimana rumusan perbuatan dalam Pasal 112 Undang-undang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan ditemukannya adanya alat bukti 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik dalam kotak bedak warna putih tersimpan di kantong celana Terdakwa di bagian kiri yang membuktikan bahwa Pelaku telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram termasuk Narkotika Golongan I. Selanjutnya Hakim menganggap bahwa Pelaku Tidak sebagai penyalahguna Narkotika berdasarkan keterangan dimana pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa tidak sedang mengonsumsi atau menggunakan Narkoba tersebut dan menurut keterangannya Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba pada tanggal 15 Maret 2012.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa Ratio Decidendi hakim dalam memutus pidana terhadap penyalah guna narkoba pada putusan Mahkamah Agung no.149K/Pid.Sus/2013 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memutus pidana tersebut hakim lebih melihat bagaimana rumusan perbuatan dalam Pasal 112 Undang-undang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan ditemukannya adanya alat bukti. Yang dalam kasus dalam penelitian ini adalah 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik dalam kotak bedak warna putih tersimpan di kantong celana Terdakwa di bagian kiri yang membuktikan bahwa Pelaku telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram termasuk Narkoba Golongan I.
2. Hakim menganggap bahwa Pelaku Tidak sebagai penyalahguna Narkoba berdasarkan keterangan dimana pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa tidak sedang mengonsumsi atau menggunakan Narkoba tersebut dan menurut keterangannya Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba pada tanggal 15 Maret 2012.

Selanjutnya *dissenting opinion* (berbeda pendapat) dalam putusan Mahkamah Agung no.149K/Pid.Sus/2013 dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam pendapat berbeda ini disimpulkan bahwa Terdakwa dapat disebut sebagai penyalahguna narkoba didasarkan fakta bahwa terdakwa baik memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkoba yang dimaksud.
2. Dalam pendapat berbeda kedua ini disimpulkan bahwa alasan kasasi yang berkenaan dengan penurunan berat ringannya pidana, tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bukan merupakan alasan formal dan obyek kasasi;

Berdasarkan kasus penyalahgunaan Narkotika diatas Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada tingkat Kasasi dalam kasus tersebut bersifat multi interpretasi atau dapat ditafsirkan ganda karena terdapat beberapa unsur yang saling terpenuhi baik pada pasal 112 maupun pasal 127 Undang-undang Narkotika.

Namun penulis berpendapat bahwa lebih tepat apabila dalam kasus ini diterapkan Pasal 127 karena dalam Pasal 127 ayat (2) menyatakan:

"Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103."⁹⁴

Dalam Pasal 103 menyatakan :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman."⁹⁵

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 "TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL" Pada Nomor 2 menyatakan:⁹⁶

⁹⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat 2

⁹⁵ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103

⁹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- 1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram.
- 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
- 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
- 5) Kelompok Ganja : 5 gram
- 6) Daun Koka : 5 gram
- 7) Meskalin : 5 gram
- 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide : 2 gram
- 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- 11) Kelompok Fentanil : 1 gram
- 12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
- 13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
- 14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15) Kelompok Kodein : 72 gram
- 16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas perbuatan Terdakwa Julie

Munthe dapat memenuhi penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

103 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari Kronologi saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut ditemukan Terdakwa berada di dalam rumah itu sendirian sambil menonton televisi. Setelah itu anggota satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penggeledahan terhadap rumah dan diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat kampung. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik transparan warna putih di dalam kotak bedak yang disimpan Terdakwa di dalam celana yang dipakai Terdakwa, tepatnya di dalam kantong celana bagian kiri.

Dan dari hasil pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dalam Berita Acara Pemeriksaan Sementara atas hasil Urine Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 yang dilakukan oleh JOHARIYADI yang merupakan PAUR KESEHATAN pada Polres Aceh Tengah dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen ACON terhadap urine Terdakwa dan didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2409/NNF/2012 tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua belas yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan MELTA TARIGAN, M. Si terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dimana jumlah barang bukti juga tidak lebih dari 1 gram.

Selain pendapat diatas, menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam hal ini hendaknya lebih menekankan adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menggunakan narkotika untuk diri sendiri, dengan ketentuan hukum khususnya Undang-Undang Narkotika dan keseimbangan jenis pidana yang diberikan, yaitu terdakwa hanya sebagai pengguna atau pecandu (yang dapat diposikan sebagai korban narkotika). Sehingga menurut pendapat penulis pemidanaan yang seimbang dengan perbuatannya adalah rehabilitasi untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkotika.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau different effect terhadap para pelakunya.⁹⁷

Pada tanggal 11 maret 2014 dikelurkanlah Peraturan Bersama (Perber) tujuh kementerian yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial dan telah ditandatangani bersama.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Bab III Pelaksanaan Pasal 3 :

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Peraturan tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses peradilan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap terdakwa Penyalahgunaan Narkotika harus menekankan bahwa setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada Lembaga medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

B. IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA ATAS PUTUSAN MA NO. 149K/PID.SUS/2013

1. Implikasi Yuridis Secara Umum

a. Batalnya Putusan Peradilan Dibawahnya

Sesuai dengan amar putusan yang ada, dapat diketahui implikasi yuridis atas keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013

⁹⁷ Siswanto Sunarso, Penegekan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.6.

adalah batalnya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 162/PID/2012/PT.BNA. tanggal 28 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 79/Pid.B/2012/ PN.TKN. tanggal 02 Oktober 2012; MENGADILI SENDIRI putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 162/PID/2012/PT.BNA. tanggal 28 November 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 79/Pid.B/2012/ PN.TKN. tanggal 02 Oktober 2012.

Dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. menjatuhkan jenis putusan pemidanaan terhadap Julie Munthe berusia 40 tahun yang merupakan warga Lorong Kala Sigo, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dan membatalkan putusan pengadilan di bawahnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair; Menyatakan Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan dibatalkannya putusan yang sudah dijelaskan diatas maka secara yuridis yang menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi terhadap terdakwa ialah putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013.

b. Putusan Mempunyai Kekuatan Eksekutorial

Implikasi yuridis atas keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013 ialah :

a) Terhadap terdakwa

1. Menyatakan Terdakwa Julie Munthe Bin Mustafa Munthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

b) Terhadap Alat Bukti

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) kotak bedak warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

c. **Putusan Menjadi Yurisprudensi**

Putusan Menjadi Yurisprudensi CST Kansil menyatakan bahwa yurisprudensi merupakan keputusan Hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh Hakim kemudian mengenai masalah yang sama.⁹⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013 menjadi yurisprudensi pengadilan yang dapat dijadikan acuan oleh hakim selanjutnya dalam menangani kasus yang sama.

⁹⁸ M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi), UB Press, Malang, 2013, hal 120.

2. Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Menetapkan suatu sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Termasuk dalam merumuskan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sesungguhnya telah memisahkan antara pengedar dan pengguna serta sanksi atau konsekuensi yang melekat padanya. Namun dalam penerapannya terdapat permasalahan terhadap adanya perbedaan antara pengedar dan pengguna tersebut yang dapat mengakibatkan adanya sanksi pidana yang tidak tepat sasaran. Sebab dari sisi kriminologi kejahatan narkotika pada kasus tertentu, bisa dikatakan termasuk dalam pengertian *crime without victim*, yang artinya bukan tidak ada korban dalam terjadinya suatu kejahatan tetapi adalah bahwa yang disebut sebagai korban adalah si pelaku itu sendiri. Pengguna sendiri dibedakan kembali yaitu pecandu dan penyalahguna.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian pengguna Narkotika dijabarkan dalam berbagai pengertian yaitu:

1. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).

2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15)

3. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (Penjelasan Pasal 54).

Namun Masalah yang timbul saat ini adalah masih banyaknya para penegak hukum kita yang memandang para pengguna narkoba ini sebagai pengedar atau sebagai pelaku tindak pidana. Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun terhadap ketentuan pasal 112 ayat (1) ini, dalam pelaksanaannya pengguna narkoba harus menghadapi resiko ancaman pidana. Bila pengguna narkoba dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkoba, karena dalam hukum pidana dikenal tidak ada kejahatan tanpa korban. Seharusnya posisi pengguna narkoba dalam hal ini pecandu dan penyalahguna narkoba, adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana dan hal ini sesuai dengan apa yang disebut dengan "teori rehabilitasi".

Teori rehabilitasi (rehabilitation) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Sebagai indikator teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila:

- a. Pembentuk Undang-undang menganggap pelaku kejahatan sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman.
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang (*forward looking*).
- c. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁹⁹

Selanjutnya terkait dengan Pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika. terutama penyalahguna yang ketika diperiksa dia menggunakannya untuk dirinya sendiri atau terindikasi menjadi pecandu.

Namun apabila ditinjau dari aspek yuridis berdasarkan Undang-undang ini adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

⁹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰⁰

Narkotika dilarang ketika penggunaan narkotika dilakukan tanpa izin oleh Undang-undang dan bahkan sekarang ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika. Demi tujuan untuk memberantas tindak pidana narkotika yang demikian memang diperlukan suatu formulasi dalam hal pengancaman pidana bagi orang yang melanggarnya. Adanya pasal 112 ayat (1) sebenarnya bagus dalam hal fungsi *prefentif* dan *represif*. Fungsi *prefentif* agar seseorang jangan sampai mencoba-coba bermain dengan narkotika ini secara ilegal dan melawan hukum sedangkan fungsi *represif* agar seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini mengalami efek jera. Namun pengenaan pasal ini sering kali digunakan juga pada pecandu dan penyalahguna narkotika. Karena mereka memiliki porsi dan bentuk hukuman tersendiri di luar hukuman pidana.

Dengan kata lain selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang narkotika, pengguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain selama terpenuhinya unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai" atau "menyediakan" Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi kecuali untuk putusan pidana penjara ketika pasal 112 ayat (1) ini diterapkan pada pengguna.

Meskipun seseorang dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana narkotika ini sekalipun tetap harus menghadapi ancaman pidana yang lebih berat menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) ini, namun dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika untuk digunakan sendiri. Sehingga secara tidak langsung menggugurkan status mengenai korban itu sendiri. Sebab tidak akan mungkin seseorang menggunakan dan kecanduan akan narkotika tanpa membeli dan memiliki narkotika secara melawan hukum.

¹⁰⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sebenarnya menimbulkan ketidakpastian hukum, di satu sisi menjamin rehabilitasi, tapi di sisi lain mempidana pengguna dan pecandu narkotika. Ketentuan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 dan pasal 103 Undang-undang Narkotika menjadi sulit untuk diterapkan. Dengan adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) maka sanksi rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika akhirnya tergantikan oleh pemenjaraan karena makna setiap orang bisa dikenakan kepada semuanya.

Tri Agus Kurniawan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) memberikan garis besar permasalahan yang ditimbulkan dari diberlakukannya pasal ini yaitu:¹⁰¹

1. Dapat mengkriminalisasi pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya wajib diberikan hak rehabilitasi berdasarkan pasal 103 yang memerintahkan yang bersangkutan (Terdakwa) untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Rentan digunakan rekayasa kasus terhadap orang yang tidak tahu menahu atau tidak terlibat aktif dalam tindak pidana narkotika. Dimaksudkan di sini adalah rentannya pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak terlibat dalam tindak pidana tapi di buat rekayasa kasus seolah-olah dia membawa atau menguasai narkotika.
3. Tumpang tindih dengan aturan pemidanaan yang lain. (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116). Pada pasal 112, pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 memiliki ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Tak hayal di lapangan terhadap satu orang bisa diberikan pasal berlapis-lapis yang berakibat tidak proporsional dalam menjatuhkan hukuman.
4. Apabila ada kasus seorang penyalahguna ini nantinya akan dikenakan lama pemidanaan berdasarkan pasal yang mana, apakah 127 ayat (1) atau pasal 112. Hal ini berkaitan dengan seringnya kedua pasal ini didakwakan

¹⁰¹ Tri Agus Kurniawan, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA. Tesis. PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA. 2013

dalam bentuk dakwaan alternatif di mana kedua pasal ini memiliki kebijakan penghukuman yang berbeda-beda. Dalam pasal 112 ayat (1) murni pidana penjara dan denda sedangkan pasal 127 bisa dimungkinkan penjara, bisa dimungkinkan rehabilitasi.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Tri Agus Kurniawan dijelaskan bahwa dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) tidak ditemukan peneliti pada pembahasan risalah sidang Undang-undang sehingga tidak diketahui pasti arah atau sasaran subyek hukum yang ingin dicapai dari adanya pasal 112 ayat (1) ini. Apakah kepada pengedar atau penyalahguna. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Tri Agus Kurniawan dengan mantan pimpinan pansus RUU Narkotika ini sekaligus anggota DPR RI Periode 2004-2009, yaitu Narasumber Nurul Falah Eddy Pariang, ditemukan dasar pertimbangan dibentuknya pasal 112 ayat (1) ini sebenarnya adalah ditujukan kepada non pecandu dan non penyalahguna, khususnya memang sasaran pasal 112 ayat (1) ini terhadap pengedar, karena dari mereka lah sumber masalah narkotika ini ada.¹⁰²

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-undang Narkotika akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Setelah itu diperbaharui menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan maksud penegasan kembali SEMA sebelumnya dan menguatkan posisi hakim sebagai yang memiliki kewenangan penuh dalam membuat penetapan rehabilitasi.

Sebagai konsekuensi logis dari SEMA ini, bagi pengguna narkotika masa menjalani pengobatan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun

¹⁰² Ibid. hal.161

2009, sehingga tidak serta merta ini menjadi konsep De-Kriminalisasi sebab perbuatannya tetap dianggap kriminal.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 149k/Pid.Sus/2013 pastinya terdapat suatu akibat atau Implikasi terhadap Terdakwa baik secara Yuridis dan Sosial. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai hal yang mungkin seharusnya diterapkan terhadap seseorang sebagai Penyalah Guna salah satunya adalah Rehabilitasi.

Berdasarkan *Ratio Decidendi* Hakim Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 149K/Pid.Sus/2013 Penulis menyimpulkan penerapan hukuman Pada Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terhadap pemidanaan tindak pidana Narkotika dilihat dari proses penangkapan terhadap terdakwa. Jika terdakwa dalam proses penangkapan sedang mengkonsumsi Narkotika maka terdakwa dapat disebut sebagai Penyalah Guna Narkotika. Namun apabila terdakwa ditangkap dalam kondisi tindak mengkonsumsi Narkotika dan ditemukan alat bukti berupa Narkotika Jenis tertentu maka terdakwa lebih dikenakan terhadap Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Namun berdasarkan kasus penyalahgunaan Narkotika diatas Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada tingkat Kasasi dalam kasus tersebut kurang tepat dikarenakan penerapan pasal dalam kasus tersebut bersifat multi interpretasi atau dapat ditafsirkan ganda karena terdapat beberapa unsur yang saling terpenuhi baik pada pasal 112 maupun pasal 127 Undang-undang Narkotika. Dan penulis berpendapat bahwa terdakwa dikenakan Pasal 127 Undang-undang Narkotika dan dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika.

Implikasi dari seseorang yang dikenakan pasal 112 dan tidak dikenakan Pasal 127 dan Pasal 103 dapat dianggap sebagai bukan penyalah guna karena dengan dikenakannya Pasal 112 terhadap terdakwa mengakibatkan terdakwa yang seharusnya mendapatkan hak untuk melakukan Rehabilitasi sebagai langkah pengobatan tidak dapat melaksanakan rehabilitasi sebagai bagian dari masa pemidanaan seperti yang dinyatakan pada pasal 103 Undang-undang Narkotika yang mewajibkan hakim untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Namun sebagai seorang yang telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa

Pasal 55 ayat (2) :

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Maka berdasarkan pasal tersebut bagi setiap orang yang dianggap sebagai Pecandu atau Penyalah Guna Narkotika dapat melaporkan dirinya atau dilaporkan orang lain untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam hal seseorang yang dikenakan pasal 112 dan tidak dikenakan Pasal 127 dan Pasal 103 maka masih dapat melakukan Rehabilitasi namun diluar masa pemidanaan.

Selanjutnya terkait dengan Upaya Hukum, dikarenakan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi merupakan tingkat terakhir dalam proses peradilan di Indonesia, maka terdakwa yang dikenakan Pasal 112 dan tidak dinyatakan sebagai Penyalahguna sudah tidak dapat mengajukan Proses peradilan selain menggunakan upaya hukum yang bersifat luar biasa seperti Peninjauan kembali.

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (*novum*).¹⁰³

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali

¹⁰³ Adi Harsanto.2019. TESIS. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

(mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka permohonan terhadap upaya hukum luar biasa memiliki syarat tertentu, yaitu: ¹⁰⁴

- a) Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b) Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, jadi tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dikarenakan harus terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
- c) Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Sedangkan syarat materiil untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: ¹⁰⁵

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

¹⁰⁴ Ibid. Hlm.5

¹⁰⁵ KUHP, Pasal 263 ayat (2)

c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.¹⁰⁶

Namun untuk kasus tindak pidana seperti dalam Putusan MA Nomor 149K/pid.sus/2013. Menurut penulis tidak dapat diajukan untuk Upaya Hukum Peninjauan kembali. Hal tersebut di karenakan tidak terpenuhinya syarat materiil diajukannya Peninjauan kembali seperti ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Karena pada dasarnya ketidaktepatan penerapan pasal dalam kasus penyalahgunaan narkoba seperti diatas disebabkan adanya ketidakjelasan dalam Norma Hukumnya. Dan selama pasal yang dinilai multitafsir seperti Pasal 112 tidak diberikan penjelasan atau perubahan maka kasus yang sama dimasa yang akan datang akan tetap dengan mudah dikenakan kepada Penyalah Guna narkoba.

Dan selama belum ada perubahan atau penjelasan terhadap Pasal-pasal seperti Pasal 112 diharapkan Majelis Hakim dalam mengadili kasus penyalahgunaan narkoba untuk tidak mengkriminalisasi pecandu atau penyalahgunaan narkoba dikarenakan hal tersebut menyebabkan banyak kemungkinan untuk tidak dapat menyelesaikan masalah penanggulangan Narkoba di Indonesia. Dan terhadap penyidik maupun penuntut umum lebih menganggap bahwa penyalahgunaan dan pecandu narkoba bukan merupakan pelaku tindak pidana murni tetapi lebih kepada korban dan apabila harus melalui proses hukum maka rehabilitasi adalah pilihan yang terbaik bagi pengguna narkoba.

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1).



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ratio Decidendi hakim dalam memutus pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba pada putusan Mahkamah Agung no.149K/Pid.Sus/2013 adalah hakim lebih melihat bagaimana rumusan perbuatan dalam Pasal 112 Undang-undang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan ditemukannya adanya alat bukti Narkotika yang memenuhi rumusan Pasal bahwa Pelaku telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I . Dan Hakim menganggap bahwa Pelaku Tidak sebagai penyalahguna Narkoba berdasarkan keterangan dimana pada saat penggeledahan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba. Selanjutnya *dissenting opinion* (berbeda pendapat) dalam putusan Mahkamah Agung no.149K/Pid.Sus/2013 dengan alasan bahwa Terdakwa dapat disebut sebagai penyalahguna narkoba didasarkan fakta bahwa terdakwa baik memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkoba yang dimaksud.
2. Implikasi yuridis terhadap penyalah guna narkoba atas putusan Mahkamah Agung no. 149k/pid.sus/2013 dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dikenakan pasal 112 dan tidak dikenakan Pasal 127 dan Pasal 103 dapat dianggap sebagai bukan penyalah guna Narkoba, karena dengan dikenakannya Pasal 112 terhadap terdakwa mengakibatkan terdakwa yang seharusnya mendapatkan hak untuk melakukan Rehabilitasi sebagai langkah pengobatan tidak dapat melaksanakan rehabilitasi sebagai bagian dari masa pemidanaan seperti yang dinyatakan pada pasal 103 Undang-undang Narkoba.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan atau penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini terutama pasal-pasal seperti pasal 112 ayat (1) yang dalam hal ini tidak membedakan secara jelas bahwa pasal tersebut ditujukan untuk seseorang penyalah guna narkoba yang hanya menggunakan Narkoba untuk diri sendiri atau terdakwa tindak pidana Narkoba yang lebih berat dan lebih diwaspadai.
2. Diharapkan kepada majelis Hakim dalam mengadili kasus penyalahguna narkoba untuk tidak mengkriminalisasi pecandu atau penyalahguna narkoba dikarenakan hal tersebut menyebabkan banyak kemungkinan untuk tidak dapat menyelesaikan masalah penanggulangan Narkoba di Indonesia. Apabila terdapat ketentuan rehabilitasi maka harus dipastikan menjadi pedoman wajib untuk dilakukan upaya rehabilitasi dan pelaksanaannya harus lebih didahulukan. Tindakan Rehabilitasi juga dapat bermanfaat bagi salah satu bagian proses peradilan pidana, khususnya bagi Lembaga pemasyarakatan yaitu agar kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
3. Diharapkan terhadap penyidik dan penuntut umum lebih menganggap bahwa penyalahguna dan pecandu narkoba bukan merupakan pelaku tindak pidana murni tetapi lebih kepada korban dan apabila harus melalui proses hukum maka rehabilitasi adalah pilihan yang terbaik bagi pengguna narkoba. Dan seharusnya penyidik lebih menitik beratkan hukuman pidana kepada peredaran gelap dan prekursor narkoba sehingga penerapan pasal tentang delik pidana bisa tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana 2009

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996

AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011

Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992)

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoretis*, (Yogyakarta: FHUII Press, 2004),

Bernard Arif Sidartha . *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* .2000 Jakarta : Mandar Maju

Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003

I Rubini, Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung

I.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cetakan Ketiga

Ian McLeod, 1999, *Legal Method*, (London, Macmillan), hlm. 144

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Pada Nilai-Nilai Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1990. Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang, 2014

Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. (Mandar Maju: Bandung. 2007)

Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010.

Lydia Harlina Marton, *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi)*, UB Press, Malang, 2013, hal 120.

M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

M.Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (yogyakarta : UII Press, 2014)

Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress), 2000

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Ruby hardiati Jhony. 2000. *diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika*, Purwokerto. Fakultas Hukum.Unsoed.

Salim, Peter, & Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1991.

Siswanto Sunarso, *Penegekan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004

Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Soedjono Dirjosisworo. *Hukum narkotika di Indonesia*. Bandung .PT. citra Aditya bakti. 1990.

Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2006

Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001.

Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013)

Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*. Edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika

Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012

JURNAL

Carlina Russel, Jurnal Karya Ilmiah, *Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013

Jeski Wilson & Dian Adriawab DG Tawang. *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PUTUSAN NOMOR 50-K/PM.III-16/AL/IV/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 53-K/PM-I-03/AD/IV/2014*. Jurnal Hukum Adigama. Tahun 2020

TESIS

Tri Agus Kurniawan, *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA*. Tesis. PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA. 2013

Adi Harsanto. *UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI*. TESIS. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. 2019.

SKRIPSI

Kartika Hanazafira Pambudi, *RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS PEMBUKTIAN BEBAS (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN.Smg)*, Skripsi, Universitas Jenderal Sudirman, 2015

MUHAMMAD CAESAR, *TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016)*, Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2018

ZELNI PUTRA, *UPAYA REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNK/KOTA) PADANG (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)*, Skripsi, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG, 2011

MEYLANI PUTRI UTAMI, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*, Skripsi, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2016

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Rancangan KUHP Nasional Tahun 2019 Pasal 54 ayat (1)

Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 TENTANG

PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU
NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI
SOSIAL

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta 2009

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Pid.Sus/2013

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 162/Pid/2012/ PT.Bna

Putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 79/Pid.B/2012/ PN.Tkn

INTERNET

Ari. "Pemakai Tapi Divonis Pengedar Narkoba, Hakim Agung Salman Luthan DO". Detik
News. 2014 . dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-2660278/pemakai-tapi-divonis-pengedar-narkoba-hakim-agung-salman-luthan-do>. (12 Oktober
2020)

Teks.co.id "Narkoba : Pengertian Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Serta Jenis –
Faktor – Tanda Gejala – Akibat – Dampak" dikutip dari
<https://teks.co.id/pengertian-narkoba-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-jenis-faktor-tanda-gejala-akibat-dampak/> (10 oktober 2020)